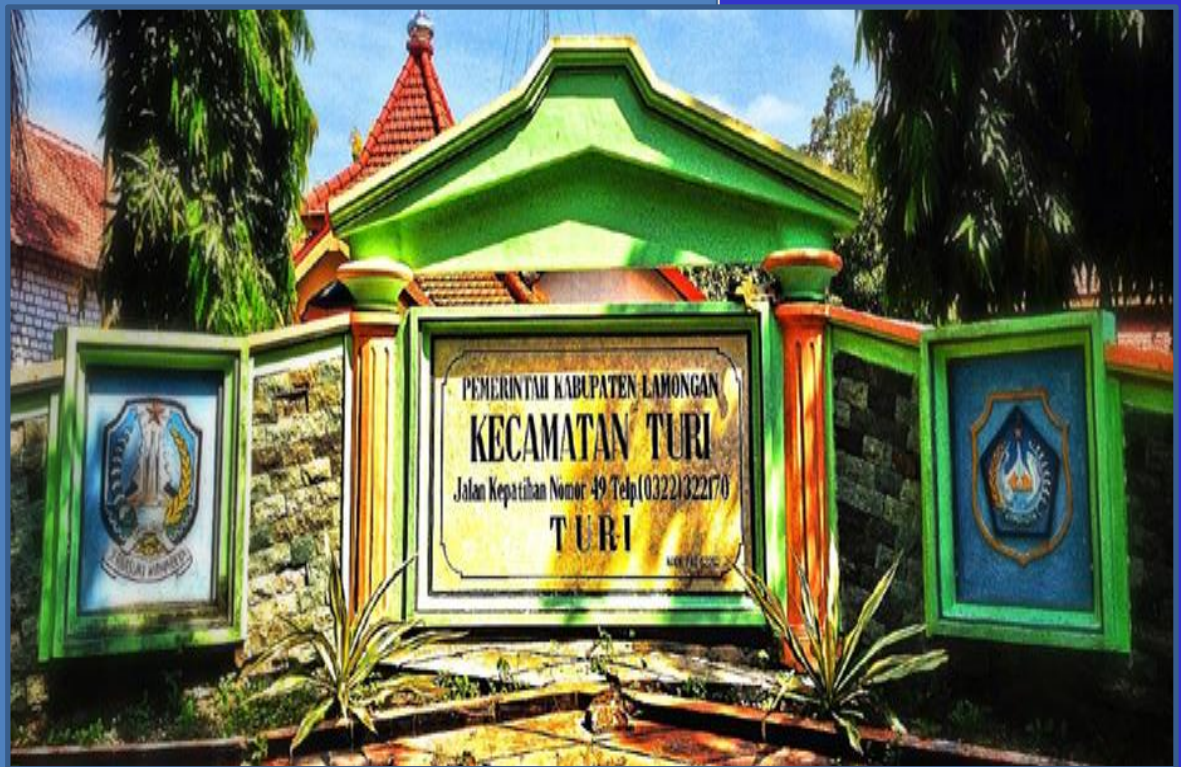


LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) KECAMATAN TURI TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN TURI

Jalan Raya Kepatihan Nomor 49 Kode Pos 62252

Telepon (0322) 322170 e-mail : turi@lamongankab.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmad dan karunia-Nya, sehingga proses penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kecamatan Turi Tahun 2022, dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kecamatan Turi Tahun 2022 ini disusun sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kantor Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan yang mengacu pada arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan, sekaligus merupakan rangkaian pelaksanaan evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengemban visi, misi, dan tujuan organisasi.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LKPJ ini masih jauh dari sempurna, sehingga diperlukan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan di tahun-tahun yang akan datang.

Semoga Allah S.W.T selalu membimbing dan menunjukkan jalan yang lurus dalam setiap kegiatan kami. Amin

Turi , Desember 2022

CAMAT TURI

BAMBANG PURNOMO, A.P., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19730922 199311 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Hukum.....	1
1.2 Visi Dan Misi Kabupaten Lamongan	1
1.3 Data Umum Daerah	2
1. Data Geografis Wilayah	2
2. Jumlah Penduduk	2
3. Pemerintahan	3
4. Jumlah PNS	4
1.4 Realisasi Belanja	5
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	7
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	9
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Capaian Pelaksanaan Program	9
A. Urusan Yang Dilaksanakan	12
Program dan Kegiatan	12
B. Capaian Kinerja Kecamatan	16
C. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	21
D. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Turi	21
E. Prestasi Kecamatan Turi	21
BAB IV PENUTUP	22

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM

Penyusunan dan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kecamatan akhir Tahun Anggaran 2022 berdasarkan :

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Prov Jawa Timur ;
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Laporan LPPD Kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi LPPD Kepada Masyarakat ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019
9. Peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 10 tahun 2021 tentang RPJMD Lamongan tahun 2021-2026;
10. Peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 33 tahun 2022 tentang RKPD Lamongan 2023.

1.2 VISI DAN MISI KABUPATEN LAMONGAN

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, **visi** Kabupaten Lamongan adalah : **“Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkeadilan”** Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut telah ditetapkan lima **misi** sebagai berikut:

Misi 1.

Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan Daerah,

Misi 2.

Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing Dan Berahklak Yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman,

Misi 3.

Mewujudkan Infrastruktur Handal Dan Berkeadilan Yang Berwawasan Lingkungan

Misi 4.

Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Sejahtera, Religius-Berbudaya, Aktif Dalam Pembangunan, Serta Lingkungan Yang Aman Dan Tenram

Misi 5.

Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi Reformasi Birokrasi.

1.3 DATA UMUM DAERAH

1. Data Geografis Wilayah

Kecamatan Turi berada di bagian barat wilayah Kabupaten Lamongan yang mempunyai luas wilayah 48.690 Km² dengan ketinggian kurang dari 7.00 m diatas permukaan air laut. Adapun batas wilayah Kecamatan Turi :

Barat	:	Kecamatan Sukodadi
Timur	:	Kecamatan Deket
Utara	:	Kecamatan Kalitengah
Selatan	:	Kecamatan Lamongan

Apabila ditinjau dari segi lokasi Kecamatan Turi termasuk daerah bonorowo yang merupakan daerah rawan banjir apabila musim penghujan datang dengan curah hujan yang tinggi dengan rata-rata curah hujan 1.742 mm setiap tahunnya. Kecamatan Turi merupakan salah satu kecamatan dengan potensi perikanan yang cukup besar dan salah satu penyumbang potensi perikanan Kabupaten Lamongan.

2. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kecamatan Turi sampai dengan 2021 sebanyak 54.583 jiwa, terdiri dari laki-laki 27.586 jiwa, Perempuan 26.997 jiwa, jumlah KK 15.845 dengan jumlah rata-rata kepadatan penduduk 1.121,03 jiwa per km². Mayoritas penduduk Kecamatan Turi beragama Islam meskipun di Kecamatan Turi terdiri dari banyak agama dengan mata pencaharian petani sawah/ tambak, peternak dan karyawan/ buruh dengan perincian sebagai berikut :

NO	DESA/ KELURAHAN	L	P	JUMLAH
1	BADURAME	1181	1195	2376
2	BAMBANG	669	638	1307
3	BALUN	2430	2430	4860
4	GEGER	2367	2372	4739
5	GEDONGBOYOUNTUNG	1783	1728	3511
6	KARANGWEDORO	1778	1763	3541
7	KEBEN	1132	1105	2237
8	KEMLAGIGEDE	1560	1520	3080
9	KEMLAGILOR	1436	1309	2745
10	KEPUDIBENER	1248	1178	2426
11	NGUJUNGREJO	1108	1066	2174

NO	DESA/ KELURAHAN	L	P	JUMLAH
12	POMAHANJANGGAN	818	821	1639
13	PUTATKUMPUL	2059	2035	4094
14	SUKOANYAR	1640	1644	3284
15	SUKOREJO	824	808	1632
16	TAMBAKPLOSO	1147	1115	2262
17	TAWANGREJO	1841	1779	3620
18	TURI	1720	1603	3323
19	WANGUNREJO	845	888	1733
JUMLAH		27586	26997	54583

3. Pemerintahan

Kecamatan Turi terdiri dari 19 Desa dan 53 Dusun serta 77 RW dan 256 RT. Sedangkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemerintahan Desa didukung dengan 17 Kepala Desa (difinitif), 19 Sekretaris Desa difinitif serta didukung oleh 149 (seratus empat puluh sembilan) Perangkat Desa yang terdiri sebagai berikut :

NO	DESA	JUMLAH DUSUN	JUMLAH RW	JUMLAH RT	KET
1	2	3	4	5	7
1	BADURAME	2	5	13	
2	BAMBANG	1	2	8	
3	BALUN	2	4	21	
4	GEGER	1	3	18	
5	GEDONGBOYOUNTUNG	7	9	18	
6	KARANGWEDORO	3	7	15	
7	KEBEN	1	5	10	
8	KEMLAGIGEDE	2	3	14	
9	KEMLAGILOR	3	3	14	
10	KEPUDIBENER	4	4	11	
11	NGUJUNGREJO	2	5	12	
12	POMAHANJANGGAN	3	3	7	
13	PUTATKUMPUL	6	7	18	
14	SUKOANYAR	3	3	11	
15	SUKOREJO	2	3	10	
16	TAMBAKPLOSO	3	3	15	
17	TAWANGREJO	3	3	18	

NO	DESA	JUMLAH DUSUN	JUMLAH RW	JUMLAH RT	KET
18	TURI	2	2	13	
19	WANGUNREJO	3	3	10	
JUMLAH		53	77	256	

4. Jumlah PNS

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Kecamatan Turi per 01 Desember 2022 memiliki 26 (dua puluh enam) pegawai, dengan status Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Kantor Kecamatan Turi dengan perincian sebagai berikut :

No	Jabatan Struktural	Jml	Pangkat/Gol Ruang	Jml	Pendidikan Formal	Jml	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Camat	1	Pembina Tk. I (IV/b)	1	S-2	1	
2.	Sekretaris Kecamatan	1	Pembina (IV/a)	1	S-2	1	
3.	Kepala Seksi	4	Pembina (IV/a)	2	S-2	2	
			Penata Tk I (III/d)	1			
			Penata Muda Tk I (III/b)	1	S-1	2	
4.	Kasubbag	2	Penata (III/c)	1	S2	1	
			Penata Muda Tk I (III/b)	1	S1	1	
5.	Staf	9	Penata Tingkat I (III/d)	1	S-1	1	
			Penata Muda Tk. I (III/b)	1	S-1	1	
			Penata Muda (III/a)	2	S-1	2	
			Pengatur Tingkat I (II/d)	1	S-1	1	
				3	SMA	3	
			Pengatur (II/c)	1	SMA	1	
			Pengatur Muda Tk.I (II/b)	0	-	0	
			Pengatur Muda (II/a)	0	-	0	
		Juru Tingkat I (I/d)	1	PAKET C	1		
9	Tenaga Kontrak	9	S-1	7			
			SMA	2			

No	Jabatan Struktural	Jml	Pangkat/Gol Ruang	Jml	Pendidikan Formal	Jml	Ket .
					SD	0	
JUMLAH				26		26	

Adapun untuk mendukung kelancaran jalannya pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Umum di Kecamatan Turi telah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Camat : 1 (Difinitif)
- b. Sekretaris Kecamatan : 1 (Difinitif)
- c. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan : 1 (Difinitif)
- d. Kasubbag Umum dan Kepegawaian : 1 (Difinitif)
- e. Kasi Pemerintahan : 1 (Difinitif)
- f. Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat : 1 (Difinitif)
- g. Kasi Ketentraman dan Ketertiban umum : 1 (Difinitif)
- h. Kasi Pelayanan Publik : 1 (Difinitif)

Di lingkungan Kecamatan Turi terdapat Dinas/Instansi baik dinas lingkup Pemerintah Kabupaten Lamongan maupun dinas lintas sektoral termasuk BUMN. Adapun secara rinci dinas lingkup Pemerintah Kabupaten Lamongan yaitu :

1. UPT Puskesmas Turi
2. Korwil Pendidikan Kecamatan Turi.
3. Korwil Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
4. Korwil PP & KB
5. KUA & PPAI Kecamatan Turi
6. SMP 1 Turi

1.4 Realisasi Belanja

Realisasi belanja tahun 2022 sebagai berikut :

Kode					Uraian	APBD PAK 2022	Realisasi Keuangan	Prosent ase
1					2	4	5	6
7	01	00	0.0		KEWILAYAHAN			
7	01	01	0.0	0	PROGRAM PENUNJANG			
			0	0	URUSAN			
					PEMERINTAHAN	2.554.841.047	2.449.583.312	95.88%
					DAERAH			
					KABUPATEN/KOTA			
7	01	01	2.0	0	Perencanaan,			
			1	0	Penganggaran, dan	45.000.000,00	45.000.000	100%
					Evaluasi Kinerja Perangkat			
					Daerah			

Kode					Uraian	APBD PAK 2022	Realisasi Keuangan	Prosent ase
1					2	4	5	6
7	01	01	2.0 2	0 0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.921.688.747	1.874.695.605	97.55%
7	01	01	2.0 5	0 0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.701.600	41.881.600	95.84%
7	01	01	2.0 6	0 0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.952.700	92.434.500	95.34%
7	01	01	2.0 8	0 0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	304.562.000	261.066.351	85.72%
7	01	01	2.0 9	0 0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.936.000	134.505.256	94.10%
7	01	02	0.0 0	0 0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	47.500.000	45.233.000	95.23%
7	01	02	2.0 1	0 0	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17.500.000	15.714.000	89.79%
7	01	02	2.0 2	0 0	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	30.000.000	29.519.000	98.39%
7	01	03	0.0 0	0 0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	42.900.000	38.821.200	90.49%
7	01	03	2.0 1	0 0	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	42.900.000	38.821.200	90.49%
7	01	06	0.0 0	0 0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	106.714.700	101.611.600	95.22%
7	01	06	2.0 1	0 0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	106.714.700	101.611.600	95.22%
					<u>JUMLAH</u>	<u>2.751.955.747</u>	<u>2.635.249.112</u>	<u>95.76%</u>

B A B II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

NO	Uraian	Indikator Kinerja	Target	APBD (Rp)	APBD Perubahan (RP)	Lebih / (Kurang) (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	7	8	10
	BELANJA LANGSUNG			2.833.365.675	2.751.955.747,00	-(81.409.928)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	80,50	2.643.716.675	2.554.841.047	-(88.875.628)	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu	8 Dokumen/Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	0	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	32 Laporan	2.015.598.675	1.921.688.747,00	-(93.909.928)	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pegawai Yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian Dengan Baik	100%	42.350.000	43.701.600,00	1.351.600	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Persediaan Barang dan Jasa Yang Tepat Waktu	66 Jenis	95.770.000	96.952.700	1.182.700	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Ketersediaan Sarana Dan Parasaran Yang Dibutuhkan	-	-	-	-	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Layanan Jasa Penunjang yang Tersedia Dengan Baik	100 %	302.062.000	304.562.000	2.500.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	142.936.000	142.936.000	0	

NO	Uraian	Indikator Kinerja	Target	APBD (Rp)	APBD Perubahan (RP)	Lebih / (Kurang) (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	7	8	10
2	PROGAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Tepat Waktu	100 %	47.500.000,00	47.500.000	-	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Kegiatan	17.500.000,00	17.500.000,00	-	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	5 Kegiatan	30.000.000	30.000.000,-		
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang melaksanakan pemberdayaan terhadap masyarakat	100%	32.900.000	42.900.000,-	10.000.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa koordinasi pemberdayaan desa	19 desa	32.900.000	42.900.000,-	10.000.000	
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Naik Kelas	31.58%	109.249.000	106.714.700,-	-(2.534.300)	
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19 Desa	109.249.000	106.714.700,-	-(2.534.300)	

B A B III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan dari penjabaran visi, misi dan strategi yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sasaran yang telah dipilih dan ditetapkan indikator sasaran serta indikator kinerja. Indikator tersebut merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif tingkat pencapaian suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tolok ukur kinerja kebijakan Kecamatan Turi berdasarkan Rencana Strategik Kecamatan Turi Tahun 2021 - 2026, dengan memperhitungkan indikator masukan (**Input**), keluaran (**Output**) dan hasil (**Outcome**). Hasil pengukuran pencapaian komponen kinerja ini dituangkan kedalam formulir Pengukuran Kinerja (**PK**). Skala pengukuran kinerja tersebut dibuat berdasarkan sasaran, indikator sasaran dan indikator kinerja yang dimiliki Kecamatan Turi.

3.1 Urusan Pemerintahan yang harus dilaksanakan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGAIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Kecamatan	Kecamatan Turi		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	83.30	83.82			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu</i>	8 Dokumen/Laporan	8 Dokumen/Laporan	SDM yang ada masih belum cukup	Diperlukan tambahan SDM baru dan dilakukan pelatihan	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu</i>	32 Dokumen	32 Dokumen	SDM yang ada masih belum cukup	Diperlukan tambahan SDM baru dan dilakukan pelatihan	
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Prosentase Pegawai Yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian Dengan Baik</i>	100 %	100 %	Sudah berjalan dengan baik	Sudah berjalan dengan baik	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Persediaan Barang dan Jasa Yang Tepat Waktu</i>	66 Jenis	66 Jenis	Sudah berjalan dengan baik	Sudah berjalan dengan baik	
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Prosentase tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor</i>	100 %	100 %	Sudah berjalan dengan baik	Sudah berjalan dengan baik	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Prosentase Layanan Jasa Penunjang Yang Tersedia Dengan Baik</i>	100 %	100 %	Sudah berjalan dengan baik	Sudah berjalan dengan baik	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Prosentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik</i>	100 %	100 %	Sudah berjalan dengan baik	Sudah berjalan dengan baik	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGAIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				PROGAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Tepat Waktu</i>	100%	100%			
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Sudah Berjalan Dengan Baik	Sudah Berjalan Dengan Baik	
				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Koordinasi/Fasilitasi Pelayanan Publik Kecamatan</i>	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Kegiatan koordinasi yang Tidak Terkoordinasi antar Institusi Forkopimcam dan desa	Melakukan Penjadwalan Kegiatan koordinasi di wilayah Se-Kecamatan Turi bersama Forkopimcam dan Aparatur Desa	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase desa yang melaksanakan pemberdayaan terhadap masyarakat</i>	100%	100%			
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Jumlah Desa Koordinasi Pemberdayaan Desa</i>	19 Desa	19 Desa	Kegiatan koordinasi yang Tidak Terkoordinasi antar Institusi Forkopimcam dan desa	Melakukan Penjadwalan Kegiatan koordinasi di wilayah Se-Kecamatan Turi bersama Forkopimcam dan Aparatur Desa	
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase Desa Naik Kelas</i>	31.58%	52.63%			
				Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Desa dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	19 Desa	19 Desa	Jumlah Desa yang banyak dengan kondisi infrastruktur yang kurang baik	Memanfaatkan teknologi terkini	

A. URUSAN YANG DILAKSANAKAN

1. KECAMATAN

Program dan Kegiatan

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan wajib dasar, urusan wajib non dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang. Adapun Urusan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Turi yaitu Sub Urusan Umum dan Urusan Kewilayahan pada Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Dengan Pagu Anggaran Program sebesar Rp. 2.554.841.047,00,- adapun Realisasi Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 2.449.583.312,- atau sebesar (95.88%). Terdiri dari 6 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah , Dengan Pagu Anggaran Kegiatan sebesar Rp. 45.000.000,- dan Realisasi Anggaran s/d Triwulan IV adalah sebesar Rp. 45.000.000,- atau sebesar (100%).
2. Administrasi Keuangan, Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD, Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulanan/semesteran SKPD. Dengan Pagu Anggaran Kegiatan sebesar Rp. 1.921.688.747,00 dan Realisasi Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.874.695.605,- atau sebesar (97.55%).
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya. Dengan pagu Anggaran kegiatan sebesar Rp. 43.701.600,00 dan Realisasi Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 41.881.600,00 atau sebesar (95.84%)
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Dengan Pagu Anggaran Kegiatan sebesar Rp. 96.952.700,- dan Realisasi Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 92.434.500,- atau sebesar (95.34%).
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan tersebut

dimaksudkan untuk Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Dengan Pagu Anggaran Kegiatan sebesar Rp. 304.562.000,- dan Realisasi Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 261.066.351,- atau sebesar (85.72%).

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan. Dengan Pagu Anggaran Kegiatan sebesar Rp. 142.936.000,- dan Realisasi Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 134.505.256,- atau sebesar (94.10%)

Foto Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah





II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Dengan Pagu Anggaran Program sebesar Rp. 47.500.000,- adapun Realisasi Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 45.233.000,- atau sebesar (95.23%). Terdiri dari 1 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait. Dengan Pagu Anggaran Kegiatan sebesar Rp. 17.500.000,- dan Realisasi Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 15.714.000,- atau sebesar (89.79%).
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan. Dengan pagu kegiatan sebesar Rp. 30.000.000,00 dan Realisasi tahun 2022 adalah sebesar Rp. 29.519.000.- atau sebesar (98.39%).

Foto Kegiatan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan





III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Dengan Pagu Anggaran Program sebesar Rp. 42.900.000,- adapun Realisasi Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 38.821.200,- atau sebesar (90.49%). Terdiri dari 1 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Dengan Pagu Anggaran Kegiatan sebesar Rp. 42.900.000,- dan Realisasi Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 38.821.200,- atau sebesar (90.49%).

Foto Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan





IV. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Dengan Pagu Anggaran Program sebesar Rp. 106.714.700,- adapun Realisasi Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 101.611.600,- atau sebesar (95.22%). Terdiri dari 1 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Fasilitasi Penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan. Dengan Pagu Anggaran Kegiatan sebesar Rp. 106.714.700,- dan Realisasi Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 101.611.600,- atau sebesar (95.22%).

Foto Kegiatan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa







B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN IKM

No	Sasaran	No	Indikator	Formula Indikator	Satuan	Baseline 2020	2021	Tahun 2022		
							Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya IKM Kecamatan	1	IKM layanan kecamatan	IKM Layanan Kecamatan	Indeks	79,25	81,25	83.22	83.82	100,1 %

C. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TINDAK LANJUT	TUJUAN MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4
KECAMATAN TURI			
1	Secara umum DPRD mengapresiasi kerja para Camat yang telah dapat melaksanakan kegiatan dengan baik, baik menyangkut Pelayanan Masyarakat, maupun Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Di Kecamatan. Sisi Kualitas Program Belum Maksimal.	Penyusunan Program dan Kegiatan akan disesuaikan dengan kondisi Wilayah Kecamatan Turi, dimana diwilayah Kecamatan Turi ada banyak kegiatan tradisi Desa (Sedekah Bumi) dan ada Desa yang memiliki gelar Desa Pancasila. Dan adanya banjir disekitaran Bengawan jero yang terjadi setiap tahun yang berdampak pada aktifitas warga.	Agar Kecamatan bisa melakukan Pembinaan terhadap Desa yang memiliki Tradisi Desa (sedekah Bumi dan Desa Pancasila). Sedangkan untuk wilayah yang tergenang banjir supaya bisa meminimalisir dampak banjir tersebut, Melalui pembersihan enceng gondok, normalisasi kali dan perbaikan infrastruktur sehingga aktifitas warga bisa berjalan lancar.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	5	6
1	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Turi	Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja. Nilai SAKIP PD dikeluarkan oleh Inspektorat	1. Camat 2. Sekcam
2	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Naik kelas	Dokumen Indeks Desa Membangun (IDM)	1. Camat 2. Sekcam 3. Semua Kasi

E. PRESTASI KECAMATAN TURI

1. Nilai Penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Semester I Tahun 2022 dengan Predikat MEMUASKAN (A).

BAB IV

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun (LKPJ) 2022 OPD Kantor Kecamatan Turi dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang merupakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

OPD Kecamatan Turi menetapkan kegiatan prioritas yang diharapkan mampu memenuhi target sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam hal pelaksanaan kegiatan meskipun menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan, tetapi secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik berkat kerjasama dan koordinasi dari seluruh penyelenggara pemerintah di Kecamatan Turi serta dukungan dan binaan dari Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun (LKPJ) 2022 Kecamatan Turi, selanjutnya untuk menjadikan periksa.

Turi , Desember 2022

CAMAT TURI

BAMBANG PURNOMO, A.P., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19730922 199311 1 003